



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI
e-Musrenbang**

**Oleh :
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

PENDAHULUAN

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)



❑ TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

- ❑ Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- ❑ Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***.
- ❑ Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.

PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017



- **UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 4 ayat 3)**
 - RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, **kewilayahan** dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (*goal*) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.
- Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.



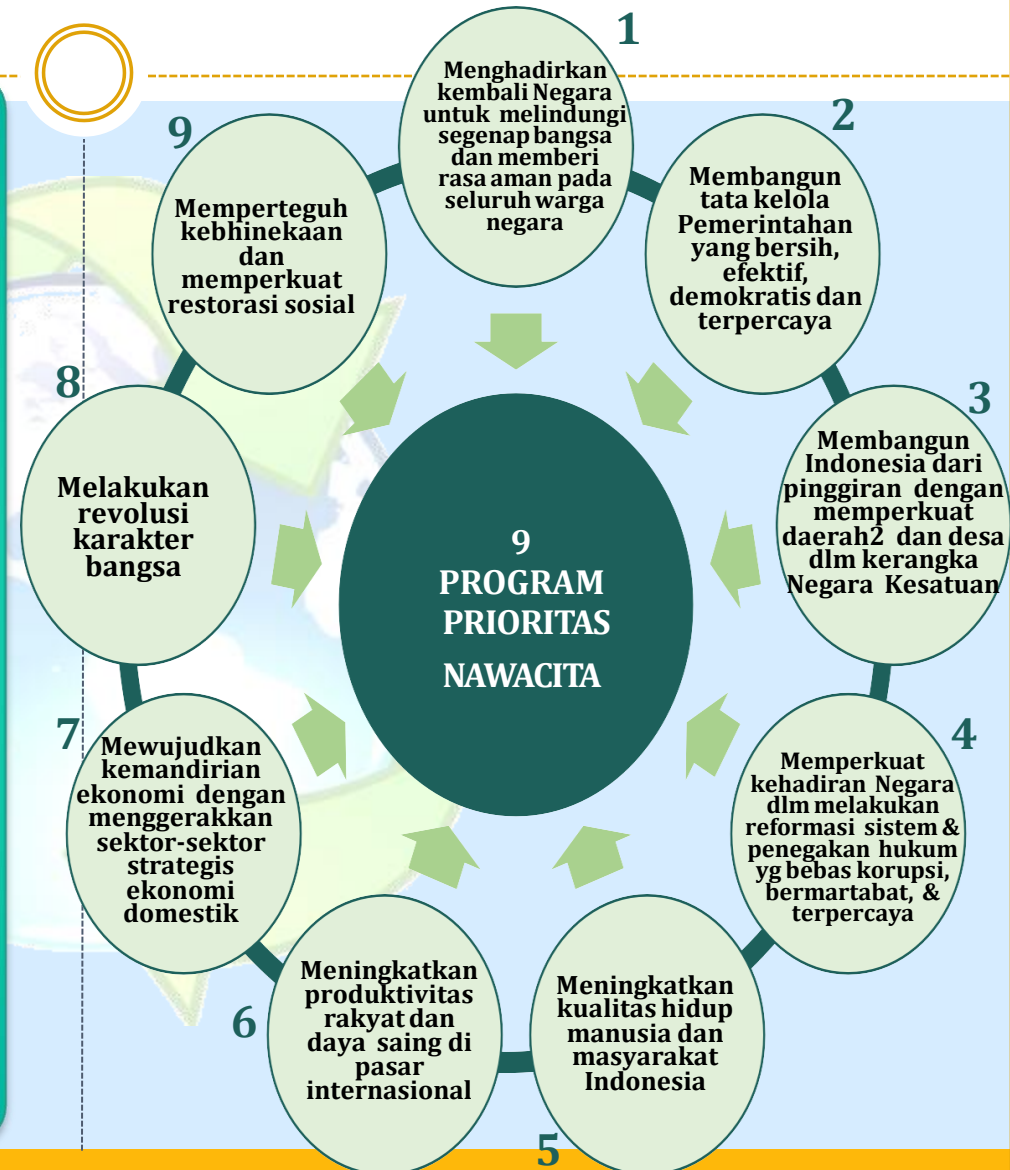
**PENDEKATAN PEMBANGUNAN :
HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL**

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 - 2019

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI, SPASIAL



- ❑ Holistik – Tematik : Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antar lain Kementan, KemenPUPR, KemenATR, KemenKLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- ❑ Integratif : Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- ❑ Spasial : pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.

PENENTUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2017

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan					
Produksi Pangan Utama:					
- Padi (Juta Ton)	70,6	75,0	76,2		82,0
Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan:					
- Jagung (Juta Ton)	19,1	19,8	21,4		24,1
- Kedelai (Juta Ton)	0,92	0,98	1,50		2,60
- Produksi Gula (Juta Ton)	2,6	2,6*	2,8		3,8
Produksi Sumber Protein:					
- Daging Sapi (Juta Ton)	0,45	0,42*	0,59		0,76
- Ikan (Juta ton)	10,6	13,6	14,8		18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:					
- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)	8,90	9,08	9,17		9,89
- Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)	2,71 (2010-2014)	0,48**	0,30**		3,01 (2015-2019)
- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif)	189,75	195,58	203,48		304,75
- Pembangunan waduk (<i>groundbreaking</i>)	16 (<i>on going</i>)	13	8		49 (2015-2019)

Arah Kebijakan:

- 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi:** (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik
- 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan:** (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan
- 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:** (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
- 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan:** benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta "Food Waste" di meja makan
2. Mendorong kreativitas dan inovasi
3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat
4. Penegakan hukum dan disiplin


* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi

Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI

- Contoh : **Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan**
 - Mempunyai multitarget (banyak sasaran)
 - ❖ **Sasaran Pokok**, antara lain :
 - Peningkatan produksi padi,
 - Peningkatan produksi jagung,
 - Peningkatan produksi ikan dll.
 - ❖ **Kegiatan Prioritas**, antara lain :
 1. Reforma agraria
 2. Stop konversi lahan produktif
 3. Pemulihan kesuburan lahan
 4. Pembangunan desa mandiri benih
 5. Pengembangan pertanian organik
 6. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
 7. Pengendalian harga dan impor pangan
 8. Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)



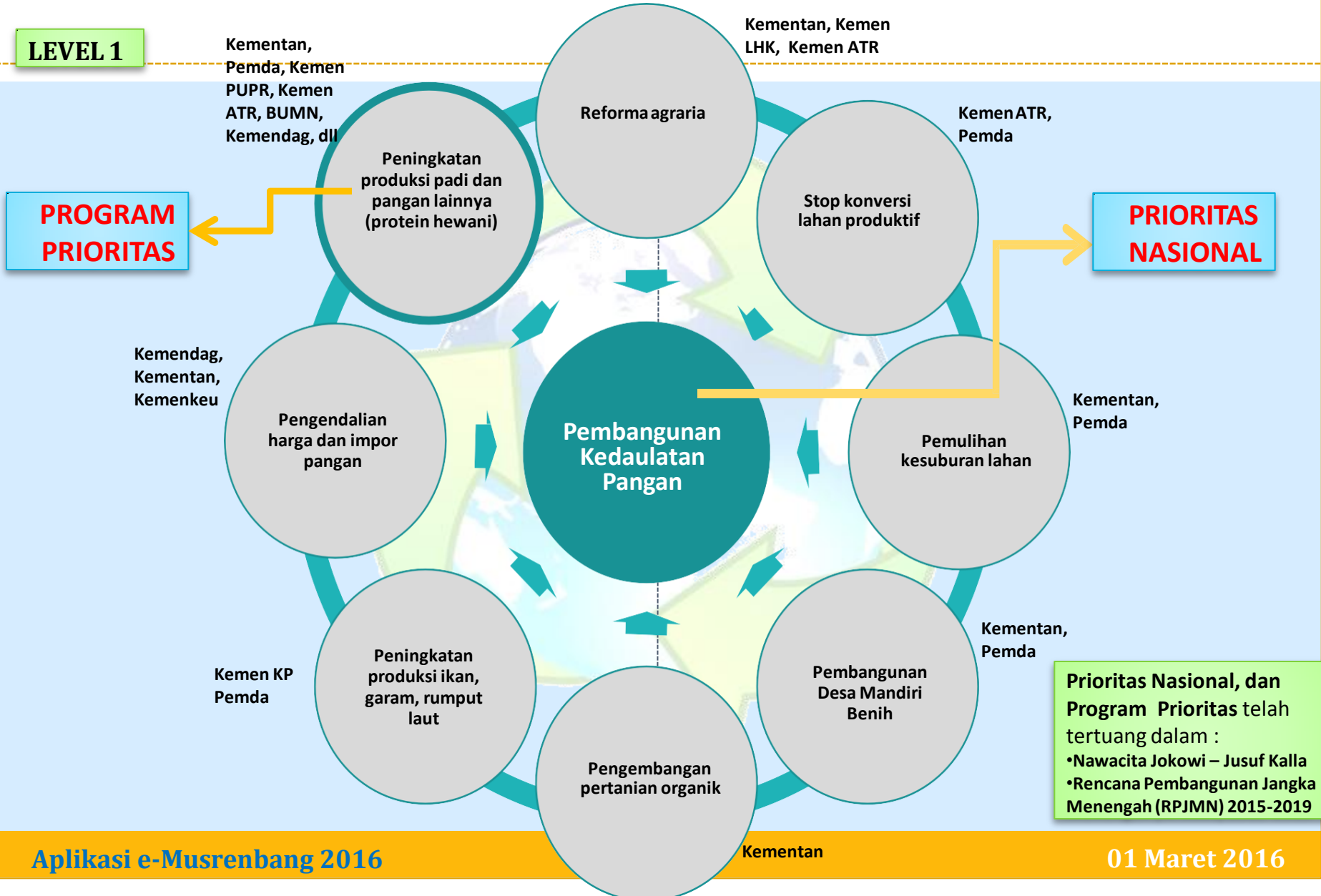
Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta **Kegiatan Prioritas** telah tertuang dalam :

•Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla

•Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

LEVEL 1



INTEGRASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR



- ❑ Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu, usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
- ❑ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil pembangunan. Sehingga hanya program-program yang akan memperoleh prioritas pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
- ❑ Selama ini, pembahasan dan pengusulan anggaran Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan secara sektoral per Kementerian/Lembaga (SKPD). Padahal, banyak sasaran/target program di K/L (SKPD) sektor yang memerlukan dukungan kegiatan dari K/L (SKPD) lain, namun K/L (SKPD) yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk mengkoordinasikan K/L lain.
- ❑ Hanya Kementerian PPN/Bappenas (Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai **koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD)**. Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.

KESIAPAN BAPPENAS

SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN



- ❑ Yang telah dan akan disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP 2017 :
 - ❑ Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017.
 - ❑ Memetakan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan agar program prioritas dapat terlaksana. Prioritas Nasional dan program prioritas telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dan RPJMN 2015-2019 (*bersifat given*).
 - ❑ Memetakan Kementerian/Lembaga yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas.
- ❑ Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan *money follow program*, Bappenas telah menyiapkan :
 - ❑ Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan prioritas.
 - ❑ Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut. (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral>)
 - ❑ Indikasi Lokasi dan Indikasi Alokasi Anggaran per Program didiskusikan dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui forum *Multilateral Meeting*.

TINDAK LANJUT :

SINERGI BAPPENAS - BAPPEDA



- ❑ BAPPENAS
 - ❑ Melakukan finalisasi program prioritas dan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan dalam pencapaian sasaran agenda prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga melalui *multilateral meeting I, bilateral meeting* dan *multilateral meeting II* ☑ Pendekatan *top-down*
 - ❑ Pembahasan indikasi lokasi dan indikasi alokasi anggaran per program
 - ❑ Dari sisi perencanaan di pusat (*top-down*), digunakan instrumen Sistem Informasi Multilateral (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral>)
- ❑ BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 - ❑ Dari sisi perencanaan di daerah (*bottom-up*), digunakan instrumen e-musrenbang (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id>)
 - ❑ Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan di daerah (lokasi) dengan pendekatan pencapaian agenda prioritas nasional melalui Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) melalui aplikasi e-Musrenbang.
 - ❑ Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk kegiatan dekon dan tugas pembantuan ke daerah melalui menu Usulan Prioritas Pembangunan Daerah (UPPD) melalui aplikasi e-Musrenbang.
 - ❑ Melakukan Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pencapaian priroitas nasional dan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang.

AGENDA PELAKSANAAN

AGENDA PELAKSANAAN

4 - 11 Mar

BILATERAL MEETING



PEMBAHASA

N: Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 - 2017- dan *Forward Estimate*

- Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)
- Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

OUTPUT

- Form B-E
- Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)
- Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

23 - 29 Feb

MULTILATERAL MEETING I



PEMBAHASAN:

- Pembahasan dan penajaman program prioritas dan kegiatan Prioritas

OUTPUT

- Form A

RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017



Kata Kunci :
"Holistik, Tematik dan Terintegrasi"
"Money Follow Program"

Pra-Musrenbang merupakan rangkaian Musrenbangnas (e-musrenbang sebagai instrumen sinkronisasi)

31 Mar - 30 Apr

RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL MEETING

Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah

4 - 8 Apr

MULTILATERAL MEETING II

1. Penyampaian pemuktahiran Prioritas Nasional
2. Penajaman sasaran-target-lokus

31 Mar

RAKORBANGPUS

1. Penyampaian RA RKP TA 2017
2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas - Menkeu)

29 Mar

SIDANG KABINET

Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017

Mei

RANCANGAN RKP

Rancangan RKP

Mei

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR

30 Apr s/d akhir Juni

TRILATERAL MEETING

Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L

Akhir Juni - Awal Juli

RKP

Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP

JADWAL PENGISIAN APLIKASI e-Musrenbang



- ❑ Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang (23 Februari 2016)
- ❑ Pelatihan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi (24 Februari 2016 – 2 Maret 2016)
 - ❑ *Multilateral Meeting Tahap I di tingkat Pusat*
- ❑ Pengisian dan Verifikasi Tahap Awal (2 Maret 2016 – 2 April 2016)
 - ❑ Input dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota (2 Maret 2016 – 24 Maret 2016)
 - ❑ Verifikasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota (28 Maret 2016 – 1 April 2016)
- ❑ Hasil Input SKPD dan Bappeda Kab/Kota menjadi masukan dalam *Multilateral Meeting Tahap II* (4-8 April 2016)
- ❑ Pengisian dan Verifikasi Tahap Akhir (9 April 2016 – 17 April 2016)
 - ❑ Input dan Revisi hanya dapat dilakukan oleh Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi (9 April 2016 – 13 April 2016)
 - ❑ Verifikasi Akhir dilakukan oleh Bappeda Provinsi (13 April 2016 – 17 April 2016)
- ❑ Forum Musrenbang (18 April – 30 April 2016)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TERIMA KASIH